

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu laut yang memiliki banyak potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi konflik. Sepanjang dekade terdapat sejumlah negara-negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dan Cina terlibat dalam konflik pengklaiman teritorial di Laut Cina Selatan, namun konflik yang terjadi tanpa disadari justru mengancam keberadaan sumber daya hayati yang ada di Laut Cina Selatan. Untuk dapat memahami lebih detail terkait problematika yang diteliti, terlebih dahulu akan dijelaskan letak geografis dan geologis Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan merupakan anak perairan dari samudera pasifik dengan luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Laut Cina Selatan berada di pinggiran Benua Asia dan Kepulauan Besar Asia Tenggara untuk itu laut ini disebut sebagai laut marginal. Secara geologis Laut Cina Selatan merupakan laut yang relatif dangkal dan sudah terbentuk sekitar 54 juta tahun yang lalu akibat dari transgresi perairan evolusi tektonik antara lempeng Eurasia dan India (Kuo, 2020). Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari barat daya ke timur laut, di batas lintang selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan terdapat selat Karimata dan batas Tiongkok daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok, di sebelah Barat terdapat Filipina, di sebelah utara Indonesia, di sebelah timur laut Semenanjung Malaya dan Singapura dan di sebelah timur terdapat Vietnam (Pamungkas, 2016).

Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu kawasan laut yang bersifat tertutup atau *semi-enclosed sea*. Laut Cina Selatan tertutup dengan teluk, lembah, laut basin atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya yang terdiri dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Di Laut Cina Selatan terdapat sekitar 200 pulau termasuk kepulauan Spratly dan

Paracel dan juga terdapat sungai-sungai seperti Mutiara, Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang dan Pasig. Adapun negara-negara yang mengelilingi Laut Cina Selatan Republik Rakyat Tiongkok yakni, Makau dan Hongkong, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam (Alunza, 2020). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar peta Laut Cina Selatan di bawah ini:

Gambar I. Peta Laut Cina Selatan



Sumber: Yuliansih. (2022) *Studi AS Terbaru Kuak Wilayah Klaim Maritim RRC di Laut Cina Selatan Melanggar*. Tersedia di <https://www.liputan6.com/global/read/4861734/studi-as-terbaru-kuak-wilayah-klaim-maritim-rrc-di-laut-china-selatan-melanggar>. (Akses: 10 Februari 2022).

Berdasarkan penelitian *American Security Project* Laut Cina Selatan tidak hanya memiliki letak geografis yang strategis tetapi laut ini juga menyimpan kekayaan hayati yang sangat potensial dan bernilai ekonomis tinggi. Di LCS terdapat potensi perikanan sebesar 1 juta ton per tahun yang terdiri dari ikan tongkol, layang, kerapu, kakap merah, kurisi, manyung, kurisi bali, salmon dan ditambah dengan hewan laut lain seperti, gurita, cumi, penyu dan lain sebagainya. Sektor perikanan di Laut Cina Selatan merupakan sektor unggulan negara-negara Asia Tenggara dengan tingkat konsumsi diprediksi pada tahun 2030 akan mencapai 36,9 juta ton dan 51,5 juta ton pada tahun 2050, tingkat konsumsi tersebut akan melebihi konsumsi protein hewan ternak sehingga sektor perikanan di LCS diprediksikan akan menjadi sektor yang akan sangat prospektif. Selain itu sektor

perikanan LCS terdapat banyak variasi perikanan terdapat 3.700 spesies ikan laut, apabila dibandingkan dengan total spesies ikan laut dunia sekitar kurang lebih 22% (D & C, 2019).

Potensi selanjutnya adalah terumbu karang terdapat sekitar 571 spesies dan jumlah tersebut belum terdeteksi secara menyeluruh. Terdapat beberapa terumbu karang yang diperkirakan mengandung cadangan energi sekitar 266 triliun kaki kubik, sehingga sering diperebutkan antara lain, karang Scarborough diperebutkan oleh Filipina dan Tiongkok, sementara karang karang Unarang-Ambalat diperebutkan oleh Malaysia dan Indonesia. Selain itu potensi di Laut Cina Selatan juga terdapat cadangan minyak dan gas mencapai 80%. Menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat kawasan LCS menyimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel, sedangkan gas alam sebesar 190 hingga 500 triliun kaki kubik (Itasari & Dewa, 2020). Jumlah minyak bumi di LCS apabila dibandingkan dengan negara penghasil minyak bumi terbesar dunia, salah satunya Venezuela terlihat berbanding jauh, negara tersebut hanya mampu menghasilkan 300,878 barel (BP Statistical Review of World Energy, 2018). Sementara perbandingan cadangan gas alam, antara Rusia sebagai negara penghasil gas alam terbesar dunia dan hasil gas alam hanya khusus pulau Natuna, memiliki kemampuan yang jauh berbeda, hasil gas alam pulau Natuna lebih tinggi dibandingkan dengan Rusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan ahli geofisika Laut Peter Clift tahun 2001 menyatakan bahwa, LCS merupakan kawasan lumbung energi, karena memiliki kapasitas cadangan hidrokarbon yakni, minyak dan gas alam yang sangat masif dan potensial.

Selain potensi kekayaan hayati, kondisi letak geografis yang strategis dimana diapit oleh dua samudera Pasifik dan Hindia serta dua benua yakni, Asia dan Australia menjadikan LCS sebagai jalur pelayaran global. Berdasarkan data UNCTAD memprediksi sejumlah aktivitas komoditi berharga seperti minyak dan gas alam melewati jalur pelayaran di LCS dengan nilai perdagangan global mencapai US\$ 3,7 triliun angka tersebut menempati posisi kedua tertinggi setelah Selat Hormuz (Asia Maritime Transparency Initiative Website, 2020). Sementara dilihat dari segi geoekonomi di LCS didukung melalui pembangunan sejumlah

pelabuhan besar yang terdapat di beberapa negara antara lain: Indonesia terdapat di Tanjung Priok dan Kuala Tanjung, Singapura terdapat di Tanjung Pelepas, Malaysia terdapat di Klang dan Vietnam terdapat di Saigon. Konektivitas yang ada menyebabkan negara-negara tersebut memiliki pengaruh besar terhadap sangketa kawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dilihat dari segi geografis dan dari segi geoekonomis negara-negara ASEAN memiliki andil dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan LCS terutama pengelolaan sumber daya hayati. Urgensi ASEAN memiliki andil dan tanggungjawab dapat dilihat dari beberapa indikator berikut; pertama dari segi geografis Laut Cina Selatan terletak di perairan Asia Tenggara, sehingga secara jumlah negara ASEAN merupakan negara terbanyak yang berbatasan langsung dengan LCS, kedua secara hukum negara-negara ASEAN yang terlibat sangketa memiliki batas hukum teritorial yang sah apabila dibandingkan dengan Cina yang tidak memiliki dasar hukum pengklaiman yang sah. Ketiga dari segi pembangunan geoekonomis menimbulkan konektivitas yang mana menunjukkan bahwa negara ASEAN memiliki pengaruh dalam konflik kawasan dan terakhir LCS sebagai jalur perdagangan global dan pusat kebangkitan ekonomi Asia, untuk itu ASEAN perlu menjaga keamanan kawasan dari segi militer dan yang paling penting adalah keamanan pengelolaan sumber daya alam hayati karena LCS menjadi laut yang potensial dan bernilai ekonomis.

Salah satu kontribusi ASEAN untuk menjaga keamanan Laut Cina Selatan dalam bidang pengelolaan sumber daya hayati, tahun 2002 ASEAN beserta kesepakatan Cina mendesain kode etik (*Code of Conduct on South Tiongkok Sea*). Kode etik tersebut merupakan bentuk tatakelola yang bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya hayati dan memastikan keseimbangan ekologis (Busyinsi, 2003). Untuk mengimplementasikan tujuan CoC ASEAN dan Cina bekerjasama melalui *ASEAN China Joint WorkingGroup on The Implementation of The Declaration on the conduct of the parties in the South China Sea* yang terdiri dari, kerjasama kemaritiman dan latihan penyelamatan kelautan, kerjasama dalam bidang penjagaan ekosistem biota, workshop dalam bidang ilmu Oceanologi dan

permasalahan iklim. Tahun 2012 ASEAN dan Cina kembali mempererat kerjasama untuk memastikan tetap bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya hayati, mendirikan *China South East Studies Center (CSARC)* sebagai lembaga penelitian bersama untuk menemukan solusi terkait masalah regional LCS diberbagai bidang yakni, penelitian dan perlindungan terhadap lingkungan, isu keamanan tradisional dan non tradisional, perlindungan lingkungan laut, penelitian lingkungan laut, pengembangan bersama dan pengelolaan sumber daya alam serta pencegahan dan pengelolaan krisis (CSARC, 2021).

Namun sampai sejauh ini upaya dan kerjasama ASEAN-CINA untuk menjaga dan mengelolah sumber daya hayati di LCS tidak berjalan optimal. Pada realitanya negara-negara yang terlibat tidak bekerjasama untuk mengimplementasikan kode etik tersebut, namun sebaliknya melanggar dan memicu kerusakan sumber daya hayati di LCS. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui presentasi Gregory Poling sebagai Direktur *Asia Maritime Transparency Initiative and Fellow in the Southeast Asia Program at the Center for Strategic and International Studies*, yang bertema menjaga lingkungan dan perikanan di LCS, menunjukkan keberadaan sumber daya hayati di LCS saat ini berada pada posisi terancam kerusakan dan kepunahan, karena disebabkan oleh sejumlah aktivitas negara bekonflik. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan hayati disebutkan Poling dalam presentasi tersebut yaitu, pembangunan pulau buatan terbesar mencapai 3.200 hektar atau sekitar 7 pulau dibangun oleh Cina dan 10 pulau di bangun oleh Vietnam (Ayu, 2020).

Pembangunan pulau buatan melalui proses pengerukan memberikan dampak fatal dimana akan merusak terumbu karang, memicu kematian ikan dan merusak ekosistem akibat adanya perubahan gelombang. Untuk saat ini sekitar 70-95% stok ikan mengalami penurunan, rasio penangkapan ikan yang menurun mencapai 66-75%, kerusakan karang mencapai 16%, khusus daerah Spartly kerusakan mencapai 160 km persegi (McNamara, 2020). Poling juga menyebutkan kapal-kapal negara kadang memasuki wilayah di luar teritorial dan bertengger sering membuang jangkar sembarangan tanpa memperhitungkan keberadaan terumbu karang, aktivitas ini salah satunya dilakukan oleh Cina saat memasuki perairan Filipina tanpa disadari merusak terumbu karang (McNamara,

2020).

Di sisi lain pembangunan pulau buatan beresiko membuka akses penangkapan ikan ilegal. Dalam artikel tentang Aspek Geografis dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan mencatat 5 negara pengklaiman wilayah LCS Brunei, Filipina, Malaysia, Cina dan Vietnam termasuk sebagai penangkap ikan terbesar di perairan LCS berkisar 27% hingga 85% (Basundoro, 2020). Sementara cadangan perikanan di LCS tahun 2018 hanya bersikar 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal telah mempengaruhi dan merubah ekosistem di LCS. Untuk saat ini negara-negara berkonflik membangun sejumlah fasilitas di reklamasi pulau untuk menjaga eksistensi kekuasaan negara. Fasilitas tersebut terdiri dari militer, radar, landasan pancu, pangkalan kapal induk hingga peluncuran rudal. Namun Cina merupakan negara yang paling agresif dimana negara tersebut menguasai 20 pulau di kepulauan Sparty dan 7 pulau di kepulauan Paracel (Basundoro, 2020). Pembangunan dan reklamasi yang dilakukan semata-mata untuk menunjukan letak kekuasaan dan otoritas di sebuah wilayah untuk tidak mengganggu kepentingan masing-masing negara berkonflik. Hal ini terlihat bahwa kerangka kode etik untuk bekerjasama mengelola kawasan LCS tidak terimplementasi dengan baik.

Selain itu cadangan hidrokarbon yang terdapat di Laut Cina Selatan menjadi salah satu alasan besar mengapa negara-negara berkonflik memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan. Negara pertama yang secara jangka panjang mengelola sumber migas di LCS adalah Filipina dan Vietnam. Pada tahun 2011 PetroVietnam bekerjasama dengan India menyepakati eksplorasi jangka panjang yang berada di 9 garis putus-putus. Filipina telah melakukan pengelolaan migas sejak tahun 1984 hingga saat ini dapat dikenal dengan Philippines, Cheron Texaco dan Perusahaan Migas Nasional Filipina (Basundoro, 2020). Sementara pada saat itu Cina mengklaim perairan teritorial berdasarkan 9 garis putus-putus untuk itu pengelolaan migas oleh Vietnam dan Filipina terdapat prokontra dengan Cina. Dalam laman *The Diplomat* (2021) beberapa dekade ini mencatat bahwa terdapat pertikaian antara Vietnam dan Tiongkok terkait aktivitas pengelolaan migas. Cina juga memasuki perairan salah satunya Indonesia dan melarang Indonesia melakukan pengeboran minyak, padahal pengeboran yang dilakukan Indonesia pada wilayah teritorial yang diakui secara sah oleh hukum

yakni, perairan Natuna. Berdasarkan penjabaran di atas terlihat kontradiksi negara-negara berkonflik dalam mengelolah sumber daya hayati minyak dan gas alam. Kondisi ini tentu akan berakibat negatif karena tidak terdapat prosedur pengelolaan yang tepat untuk mengarahkan negara-negara tersebut bagaimana melakukan pengelolaan yang baik dan benar.

Militerisasi yang dibangun tidak berlandaskan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian hayati di Laut Cina Selatan, salah satu buktinya Cina membentuk *buffer zone* (zona penyangga). Zona tersebut dibangun dengan tujuan menahan serangan militer supaya tidak memasuki ke daratan Tiongkok, langkah tersebut jika terjadi pertempuran di zona penyangga maka akan beresiko besar terhadap negara-negara yang memiliki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif termasuk Indonesia di laut Natuna Utara dan akan beresiko terhadap aktivitas ekonomi dan keamanan sumber daya hayati (Junef, 2018). Bukan hanya itu perdagangan gas alam yang transit dapat memberikan dampak fatal, jika terdapat kebocoran maka beresiko menimbulkan polusi udara dan kematian biota laut (Ayu, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan masalah keanekaragaman hayati dimulai dari pertama, ketidakpatuhan negara-negara baik ASEAN maupun Cina terhadap CoC yang telah dibentuk sejak tahun 2002. Kedua, ketidakpatuhan menimbulkan kerusakan dan mengancam kepunahan hayati di laut Cina Selatan, pernyataan ini dibuktikan melalui presentasi Gregory Poling sebagai Direktur *Asia Maritime Transparency Initiative and Fellow in the Southeast Asia Program at the Center for Strategic and International Studies*. Ketiga, dilihat dari segi geografis sebagian besar negara-negara ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga ASEAN memiliki andil yang cukup besar untuk menjaga Laut Cina Selatan, namun pada realitanya negara ASEAN turut tidak menaati peraturan dalam CoC yang telah dibentuk atas kesepakatan bersama, negara-negara tersebut adalah, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Singapura.

Sementara Indonesia merupakan negara yang juga turut mendapatkan dampak dalam konflik ini. Dari penjelasan yang ada menimbulkan pertanyaan mengapa negara ASEAN sebagai organisasi namun sulit dalam bekerjasama mengelolah sumber daya hayati di Laut Cina Selatan. Berangkat dari uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti, tentang faktor atau penyebab kompleksitas kerjasama ASEAN dalam mengelolah keanekaragam hayati di Laut

Cina Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menyebabkan kompleksitas kerjasama ASEAN dalam mengelolah sumber daya hayati di LCS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kompleksitas kerjasama ASEAN dalam mengelolah sumber daya hayati di Laut Cina Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak konflik terhadap sumber daya hayati di Laut Cina Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan antara lain:

1. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait kompleksitas kerjasama ASEAN dalam mengelolah sumber daya hayati di Laut Cina Selatan,
2. Bagi Pemerintah, dapat menjadi acuan dalam membentuk dan mengambil kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi Penelitian lain, dapat dijadikan sebuah landasan jika tertarik untuk meneliti topik penelitian ini. Untuk itu dapat dianalisis lebih lanjut tentang ASEAN dalam menentukan dan mengimplementasi pengelolaan sumber daya hayati yang tepat di Laut Cina Selatan.

1.5 Sistematika Bab

Pada penulisan skripsi ini peneliti akan menyajikan isi penelitian mulai dari BAB I -BAB V dan akan dianalisis melalui adanya sub-bab sebagai berikut:

• BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latarbelakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

• **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori dalam penelitian serta akan disajikan penelitian terdahulu, dimana mengkomparasikan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Terdapat juga penyajian kerangka berpikir melalui bagan (*mind mapping*) yang akan menjelaskan alur berpikir.

- 2.1. Landasan Teori
- 2.2. Penelitian Terdahulu
- 2.3. Kerangka Pemikiran

• **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang berisi bagaimana pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

- 3.1. Metode Penelitian
- 3.2. Teknik Pengumpulan Data
- 3.3. Teknik Analisis

• **BAB IV: ANALISIS PENYEBAB KOMPLEKSITAS KERJASAMA ASEAN DALAM MENENTUKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI DI LAUT CINA SELATAN**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang akan diakaji melalui dua sub bab:

- 4.1. Kode Etik Laut (*Code of Conduct*) Cina Selatan sebagai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hayati
- 4.2. Faktor-Faktor Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam

• **BAB V: PENUTUP**

Bab ini adalah bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga peneliti akan memaparkan saran-saran dari penelitian.

